



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD) TAHUN ANGGARAN 2024

A. Capaian Kinerja Makro

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program dan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional. Indikator umum (makro) merupakan indikator gabungan (komposit) dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi maupun sosial. Capaian indikator kinerja makro Kabupaten Sleman pada tahun anggaran 2024, sebagai berikut:

Capaian Kinerja dan Laju Kinerja Indikator Kinerja Makro Tahun 2023-2024

No.	Indikator Kinerja Makro	Satuan	Capaian Kinerja		Laju Kinerja
			2023	2024	
1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	%	84,86	85,71	1,00%
2.	Angka Kemiskinan	%	7,52	7,46	- 0,80%
3.	Angka Pengangguran	%	4,47	4,13	- 7,61%
4.	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,09	5,19	1,96%
5.	PDRB ADHB per Kapita	Rp (ribu)	53.416,03	56.949,35	6,61%
6.	Ketimpangan Pendapatan	rasio	0,433	0,428	- 1,15%

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman, 2025

B. Ringkasan Capaian Kinerja Urusan Pelayanan Dasar

Capaian kinerja urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan wajib yang berkaitan pelayanan dasar, meliputi urusan pendidikan, urusan kesehatan, urusan pekerjaan umum, urusan perumahan rakyat, urusan ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, serta urusan sosial.

1. Urusan Pendidikan

a. Capaian Kinerja Outcome

Capaian kinerja urusan pendidikan yang diperoleh Kabupaten Sleman pada tahun 2024 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut:





Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Tahun 2023-2024

No.	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	
		2023	2024
1.	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	93,77%	101,76%
2.	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	99,97%	100,32%
3.	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	99,78%	101,51%
4.	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	88,14%	89,45%

Sumber: Dinas Pendidikan, 2025

b. Anggaran dan Realisasi Belanja Urusan Pendidikan

Anggaran urusan pendidikan di Kabupaten Sleman tahun 2024 sebesar Rp946.754.899.075,00 dan terealisasi sebesar Rp931.894.219.960,35 (98,43%), dengan program sebagai berikut:

Anggaran dan Realisasi Keuangan Program pada Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Tahun 2024

Program	Anggaran	Realisasi	%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	596.748.936.491,00	592.630.225.013,00	99,31%
Program Pengelolaan Pendidikan	349.976.855.584,00	339.245.187.817,35	96,93%
Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	29.107.000,00	27.507.130,00	94,50%
Jumlah	946.754.899.075,00	931.894.219.960,35	98,43%

Sumber: Dinas Pendidikan, 2025

c. Permasalahan yang Dihadapi

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan pendidikan di Kabupaten Sleman tahun 2024, sebagai berikut:

- 1) Masih adanya anak usia sekolah (usia 7-18 tahun) yang putus/tidak sekolah dan belum kembali bersekolah melalui jalur pendidikan formal/nonformal.
- 2) Belum optimalnya kesadaran penduduk usia 19 tahun ke atas yang belum menamatkan wajib belajar 12 tahun untuk mengikuti jalur pendidikan nonformal program kesetaraan Paket A, B, atau C.
- 3) Masih adanya anak usia 5-6 tahun yang belum mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini baik melalui TK, KB, SPS, ataupun TPA yang telah memiliki ijin operasional.
- 4) Pemerataan akses layanan pendidikan dasar masih belum optimal, terutama layanan SMP Negeri, sebagai dampak dari dinamika kependudukan dimana pada usia 0-6 tahun mengalami penurunan jumlah, usia 7-12 tahun cenderung stabil, sedangkan usia 13-15 tahun mengalami kenaikan jumlah.





5) Pemerataan kualitas pendidikan masih belum optimal dalam hal pemerataan atau distribusi guru yang berkualitas (memiliki ijazah minimal S1 dan bersertifikat pendidik), terutama jenjang SD. Ditambah dengan beban tugas tambahan bagi beberapa guru SD selain tugas pokok mengajar, seperti diantaranya tugas menjadi operator Dapodik sekolah, bendahara sekolah, pengelola aset dan persediaan, atau tugas tambahan lainnya.

2. Urusan Kesehatan

a. Capaian Kinerja Outcome

Capaian kinerja urusan kesehatan yang diperoleh Kabupaten Sleman pada tahun 2024 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	
		2023	2024
1.	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	3,04%	3,09%
2.	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	100,00%	100,00%
3.	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	98,64%	98,79%
4.	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100,08%	99,11%
5.	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	97,76%	100,76%
6.	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	76,42%	78,70%
7.	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	98,91%	95,79%
8.	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	64,91%	67,47%
9.	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	76,06%	76,58%
10.	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	97,54%	96,38%
11.	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	104,93%	98,08%
12.	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100,72%	100,41%
13.	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	111,93%	116,94%
14.	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	152,09%	155,39%

Sumber: Dinas Kesehatan, 2025

b. Anggaran dan Realisasi Belanja Urusan Kesehatan

Anggaran urusan kesehatan di Kabupaten Sleman tahun 2024 sebesar Rp624.144.547.689,00 dengan realisasi Rp584.228.789.466,95 (93,60%), dengan program sebagai berikut:





Anggaran dan Realisasi Keuangan Program pada Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Tahun 2024

Program	Anggaran	Realisasi	Persentase
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	430.811.872.084,00	387.557.876.174,56	89,96%
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	159.099.338.826,00	150.878.295.587,23	94,83%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.923.356.050,00	1.840.830.213,00	95,71%
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	792.646.420,00	720.296.828,00	90,87%
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	4.616.922.253,00	4.520.899.506,00	97,92%
Jumlah	624.144.547.689,00	584.228.789.466,95	93,60%

Sumber: Dinas Kesehatan, 2025

c. Permasalahan yang Dihadapi

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan kesehatan di Kabupaten Sleman tahun 2024, sebagai berikut:

- 1) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat belum membudaya di berbagai tatanan
- 2) Pemberdayaan kesehatan bersumberdaya masyarakat (UKBM) melemah ditengah tuntutan kader yang kompeten dan melek teknologi
- 3) Pelayanan terhadap usia produktif usia 15 - 59 tahun belum optimal karena:
 - a) sistem informasi untuk pencatatan kegiatan skrining PTM belum optimal.
 - b) Data output hasil skrining yang telah mendapat penanganan tindak lanjut belum optimal. (Berapa yang ditemukan melebihi standar normal dan dirujuk ke fasyankes utk mendapat pelayanan kesehatan lebih lanjut).
 - c) Pelaksanaan kegiatan skrining belum sampai ke satuan pendidikan lanjut utamanya universitas di karenakan koordinasi yang belum baik dan optimal dengan pihak kampus.
- 4) Pencapaian standar pelayanan minimal pelayanan kesehatan bagi penderita hipertensi & DM masih terjadi *underreporting* data dari faskes jejaring. dan sistem dukungan pengobatan penyakit kronis yang ada belum optimal dalam meningkatkan kepatuhan penderita untuk menjalani pengobatan teratur di fasilitas kesehatan.
- 5) Pelayanan kesehatan sesuai standar pada ODGJ berat telah tercapai namun masih ditemukan belum optimalnya dukungan keluarga untuk mendapatkan akses pelayanan, juga masih adanya stigma terhadap ODGJ berat.





- 6) Belum tercapainya target pemenuhan sarana prasarana alat kesehatan (SPA) sesuai standar >60 % sebesar 84,42%
- 7) Dalam pelaksanaannya SES belum optimal, karena:
 - a) Masih kurangnya Sumber Daya Manusia petugas SES yang melaksanakan ketugasan dengan 2 shift
 - b) Anggaran kegiatan PSC SES telah memenuhi kebutuhan dalam pelaksanaan ketugasan PSC SES
 - c) Kurang representatif nya Posko PSC SES
 - d) Belum efektifnya koordinasi dan komunikasi antar fasilitas kesehatan
 - e) Rendahnya partisipasi jejaring dalam pengajuan klaim penanganan kegawatdaruratan
 - f) Belum terbangunnya komitmen petugas pelaksana puskesmas
 - g) Petugas belum memahami tupoksi serta SOP secara menyeluruh
 - h) Kurangnya sosialisasi tentang PSC SES kepada masyarakat
- 8) Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis terkendala dalam proses perpanjangan Surat Izin Praktek (SIP) dengan adanya kebijakan pemenuhan satuan kredit profesi dalam penerbitan perpanjangan surat izin praktek bagi tenaga kesehatan dan tenaga medis.
- 9) Nilai IKM (Indeks Kepuasan Pelayanan Penunjang dan pemenuhan sarana rumah sakit) tahun 2024 RSUD Prambanan belum tercapai; Data ASPAK hanya mengalami penurunan dari 74,80 menjadi 72,59 turun sebesar 2,21 poin
- 10) Bangunan IGD RSUD Sleman yang terletak di lantai 2 Gedung Pelayanan Terpadu dengan akses jalan menuju IGD menanjak sehingga beresiko Kejadian Tidak Diinginkan (KTD).
- 11) Keterbatasan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) sesuai standar kebutuhan RS Pengampu Kanker, Jantung, Stroke, *Uronefro* (KJSU)-KIA
- 12) Keterbatasan Sarana Prasarana kesehatan sesuai dengan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) dalam menunjang pengembangan pelayanan di RSUD Sleman sebagai RS pengampu Kanker, Jantung, Stroke, dan *Uronefro* (KJSU)-KIA strata madya.
- 13) Perbedaan persepsi yang salah tentang AFP masih menjadi hambatan terbesar.





- 14) Pengawasan terhadap sarana pengelolaan obat/alkes sebagian besar baru dapat dilakukan terhadap apotek, dan sebagian kecil sudah mulai menysasar ke sarana yang lain seperti toko obat, rumah sakit dan klinik, sedangkan untuk toko/distributor alkes, dan optical belum dapat terjangkau karena keterbatasan SDM.
- 15) Meningkatnya masalah berat badan kurang dan sangat kurang pada balita.
- 16) Masih terbatasnya Puskesmas PONEK dan RS PONEK
- 17) Dalam hal Tenaga Kesehatan belum optimal karena:
 - a) Kurangnya jumlah pegawai dibandingkan dengan Analisis Beban Kerja (ABK)
 - b) Ketimpangan distribusi tenaga antar Puskesmas
 - c) Belum semua PNS mengisikan data kepegawaiannya di aplikasi SIMPEG secara lengkap
 - d) Masih adanya data domisili PNS yang belum sesuai data terbaru, sehingga mempengaruhi penataan pegawai
 - e) Adanya larangan pengangkatan tenaga kesehatan Non-ASN.
- 18) Masih adanya penyakit menular, sehingga perlu internalisasi masif PHBS yang melibatkan kader lintas sektor
- 19) Masih adanya angka kematian ibu melahirkan dan bayi lahir, sehingga diperlukan upaya promotive, preventif dan represif serta lintas sektor.

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a. Capaian Kinerja Outcome

Capaian kinerja urusan pekerjaan umum dan penataan ruang yang diperoleh Kabupaten Sleman pada tahun 2024 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut:

Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2023-2024

No.	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	
		2023	2024
1.	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota	0	0
2.	Rasio luas kawasan pemukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	0	0
3.	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	33,05%	33,54%
4.	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	100%	100%





No.	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	
		2023	2024
5.	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	85,57%	100%
6.	Rasio kepatuhan IMB Kab/Kota	100%	100%
7.	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	82,20%	76,86%
8.	Rasio tenaga operator/teknis/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	84,84%	97,88%
9.	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100%	100%

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2025 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, 2025
Dinas Lingkungan Hidup, 2025

b. Anggaran dan Realisasi Belanja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Anggaran urusan pekerjaan umum dan penataan ruang di Kabupaten Sleman tahun 2024 sebesar Rp166.771.190.039,00 terealisasi Rp161.864.291.689,40 (97,06%), dengan program sebagai berikut:

Anggaran dan Realisasi Keuangan Program pada Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2024

Program	Anggaran	Realisasi	Persentase
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	25.403.420.641,00	24.185.506.280,00	95,21%
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	45.497.389.270,00	44.357.177.502,00	97,49%
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	8.861.201.300,00	8.717.201.848,00	98,37%
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	16.385.371.550,00	15.869.850.901,39	96,85%
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	14.662.179.900,00	14.591.050.051,00	99,51%
Program Penataan Bangunan Gedung	6.684.745.800,00	6.440.9997.501,00	96,35%
Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	622.575.400,00	616.063.134,00	98,95%
Program Penyelenggaraan Jalan	57.243.699.023,00	55.314.211.479,00	96,63%
Program Pengembangan Jasa Konstruksi	895.642.400,00	816.088.780,00	91,12%
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1.450.847.471,00	1.403.007.928,00	96,70%
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	528.749.000,00	527.613.851,00	99,79%
Jumlah	166.771.190.039,00	161.864.291.689,40	97,06%

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2025 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, 2025
Dinas Lingkungan Hidup, 2025

c. Permasalahan yang Dihadapi

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang di Kabupaten Sleman tahun 2024, sebagai berikut:

- 1) Rencana tata ruang mengakomodir banyak pemangku kepentingan dan sektor, sehingga memerlukan sinkronisasi antar kebijakan
- 2) Sistem OSS RBA yang belum sempurna belum memadai yang terbatas dan bersyarat
- 3) Belum adanya sistem data base yang memuat peta lokasi kegiatan yang dimohon





- 4) Perlunya proses pengolahan dan validasi data sebelum disajikan dalam SIM TARU dan SIM Geoportal
- 5) Masyarakat belum memanfaatkan sistem yang tersedia secara optimal.
- 6) Belum optimalnya sarana dan prasarana air limbah baik melalui jaringan perpipaan (IPAL Komunal, IPAL Skala Kawasan, IPAL Skala Perkotaan) maupun tangki septik (IPAL Skala Individu)
- 7) Kurangnya kesadaran masyarakat untuk memelihara sarana dan prasarana sanitasi
- 8) Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan penyedotan lumpur tinja secara berkala untuk mencapai akses sanitasi aman
- 9) Kurangnya armada operasional dan keterbatasan SDM penyedotan, sehingga akses pemeliharaan/ penyedotan kurang optimal
- 10) Belum optimalnya pengolahan limbah lemak dari kegiatan domestik

4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

a. Capaian Kinerja Outcome

Capaian kinerja urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang diperoleh Kabupaten Sleman pada tahun 2024 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut:

Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Tahun 2023-2024

No.	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	
		2023	2024
1.	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten / Kota	0	0
2.	Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota	100	100
3.	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh Dibawah 10 Ha di Kabupaten/Kota yang Ditangani	22,98%	40,17%
4.	Berkurangnya Jumlah Unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	2,31%	2,30%
5.	Jumlah Perumahan yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	100%	0,95%

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2025

b. Anggaran dan Realisasi Belanja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Anggaran urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman di Kabupaten Sleman tahun 2024 sebesar Rp19.303.674.700,00 dengan realisasi sebesar Rp18.597.085.785,00 (96,34%), dengan program sebagai berikut:





Anggaran dan Realisasi Keuangan Program pada Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Tahun 2024

Program	Anggaran	Realisasi	Persentase
Program Pengembangan Perumahan	97.073.950,00	96.701.800,00	99,62%
Program Kawasan Permukiman	15.719.120.750,00	15.039.413.285,00	95,68%
Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	3.487.480.000,00	3.460.970.700,00	99,24%
Jumlah	19.303.674.700,00	18.597.085.785,00	96,34%

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2025

c. Permasalahan yang Dihadapi

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman di Kabupaten Sleman tahun 2024, sebagai berikut:

- 1) Masih adanya masyarakat yang kurang sadar dalam memelihara dan menggunakan PSU sehingga menganggap jika ada kerusakan sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk memperbaiki, sedangkan PSU sebenarnya merupakan kebutuhan masyarakat sehingga diharapkan masyarakat ikut berpartisipasi dalam merawat dalam perwujudan menggunakannya sesuai dengan ketentuan sehingga terhindar dari kerusakan yang tidak semestinya.
- 2) Keengganan warga meninggalkan rumah tinggalnya yang berada di Kawasan Rawan Bencana Gunungapi Merapi.
- 3) Kondisi permukiman kumuh dari tahun ke tahun semakin meningkat karena adanya fenomena urbanisasi, aspek normatif penanganan permukiman kumuh dan pencegahan penanganan perkumuh yang kurang optimal.
- 4) Kesiapan swadaya, kesiapan lahan/status tanah, terbatasnya anggaran, serta ketidaksesuaian kriteria beberapa rumah tidak layak huni yang diajukan sehingga program perbaikan batal diberikan.
- 5) Ketersediaan hunian terhitung masih kurang banyak untuk memenuhi permintaan penghuni baru. Kurangnya kesadaran penghuni untuk menjaga dan merawat fasilitas yang ada di rusunawa sehingga masih banyak fasilitas umum yang masih dalam kondisi kurang baik. Serta kurangnya dana untuk pemeliharaan di rusunawa.
- 6) Adanya keterbatasan lahan yang menyulitkan perluasan area pemakaman seiring dengan meningkatnya kebutuhan. Selain itu, proses penyesuaian terhadap regulasi terbaru juga menjadi tantangan tersendiri,





mengingat adanya perubahan kebijakan yang memerlukan waktu untuk diterapkan secara efektif. Di samping itu, kendala teknis seperti keterlambatan dalam perbaikan fasilitas turut berdampak pada kualitas layanan.

5. Urusan Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

a. Capaian Kinerja Outcome

Capaian kinerja urusan ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang diperoleh Kabupaten Sleman pada tahun 2024 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut:

Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
Tahun 2023-2024

No.	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	
		2023	2024
1.	Persentase Gangguan Trantibum yang Dapat Diselesaikan	100,00%	100,00%
2.	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	52,63%	68,42%
3.	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana	100,00%	100,00%
4.	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100,00%	100,00%
5.	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100,00%	100,00%
6.	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	83,43%	100,00%
7.	Waktu Tanggap (Response Time) Penanganan Kebakaran	11,19 Menit	17,21 menit

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja, 2025 dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2025

b. Anggaran dan Realisasi Belanja Urusan Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Anggaran urusan ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Sleman tahun 2024 sebesar Rp37.902.395.446,00 dengan realisasi Rp36.144.527.073,63 (95,36%), dengan program sebagai berikut:

Anggaran dan Realisasi Keuangan Program pada Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2024

Program	Anggaran	Realisasi	Persentase
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	16.144.172.298,00	15.678.265.870,00	97,11%.
Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	7.337.656.344,00	6.890.116.995,00	93,90%
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan non Kebakaran	1.081.107.933,00	860.427.810,00	79,59%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.582.402.971,00	6.324.701.346,16	95,34%
Program Penanggulangan Bencana	6.754.245.800,00	6.389.898.902,47	94,61%
Jumlah	37.902.395.446,00	36.144.527.073,63	95,36%

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja, 2025 dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2025





c. Permasalahan yang Dihadapi

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Sleman tahun 2024, sebagai berikut:

- 1) Pencapaian jumlah SPAB terhadap total sekolah yang ada masih sangat rendah persentasenya
- 2) Kurang koordinasi dalam pemeliharaan sumber daya air mengakibatkan terganggunya air baku/air bersih masyarakat sehingga BPBD harus dropping air
- 3) Kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas umum dan fasilitas sosial terkendala sistem keuangan
- 4) Distribusi kewenangan pengampu peraturan daerah ke beberapa perangkat daerah yang belum optimal pada aspek koordinasi, kepastian tata cara pelaksanaan pengawasan dan pembinaan termasuk peninjauan sanksi, aspek pengawasan dan pembinaan dengan aspek penindakan masih bias, perangkat daerah pengampu perda belum memberdayakan PPNS yang dimiliki secara optimal
- 5) Ketugasan dan fungsi PPNS yang belum berjalan optimal disebabkan karena kurangnya fasilitas infrastruktur (sekretariat) PPNS dan administrasinya, kurangnya instrument yang mendukung kesejahteraan PPNS, serta jumlah PPNS yang ada belum memadai dibandingkan dengan jumlah Perda bersanksi yang harus ditegakkan.
- 6) Jumlah anggota Polisi Pamong Praja belum ideal, sesuai dengan Permendagri Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja maka idealnya jumlah Polisi Pamong Praja di Kabupaten Sleman ada 251 orang, sedangkan jumlah Polisi Pamong Praja yang sekarang 177 orang terdiri dari 90 PNS DAN 87 NON PNS (masih kurang 74 orang)
- 7) Kurangnya Sarpras (armada penjangkauan dan alat komunikasi/HT dan Repiter).
- 8) Rasio jumlah anggota linmas belum ideal. Sesuai dengan Permendagri Nomor 62 Tahun 2008 disebutkan bahwa 1 RT=1 Linmas, sehingga untuk Kabupaten Sleman dibutuhkan Linmas 7.414 personil, sedangkan





jumlah yang ada saat ini, yaitu 7.117 orang. Rasio anggota linmas per RT tahun 2024 sebesar 0,98 yaitu jumlah Linmas 7.117 dibagi jumlah RT 7.414 artinya belum setiap RT belum memiliki anggota linmas.

- 9) Keanggotaan linmas didominasi oleh anggota yang berusia 50 tahun (55%), sedangkan usia 65 tahun (23%). Hal ini tentunya semakin kesana akan ada banyak linmas yang purna tugas dan seharusnya digantikan dengan yang lebih muda.
- 10) Belum terpenuhinya daerah layanan pemadaman kebakaran dalam setiap WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran). Kejadian Kebakaran di Wilayah WMK, Respons Time masih bisa terpenuhi, tetapi di luar WMK radius 7,5 KM dari Posko Induk dan Godean tidak bisa terpenuhi waktu tanggap kurang dari 15 menit.
- 11) Belum terbentuknya Satlakar; di setiap Kalurahan/Padukuhan

6. Urusan Sosial

a. Capaian Kinerja Outcome

Capaian kinerja urusan sosial yang diperoleh Kabupaten Sleman pada tahun 2024 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut:

Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Tahun 2023-2024

No.	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	
		2023	2024
1.	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti (Indikator SPM)	100,00%	92,08%
2.	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/Kota	100,00%	100,00%

Sumber: Dinas Sosial, 2025

b. Anggaran dan Realisasi Belanja Urusan Sosial

Anggaran urusan sosial di Kabupaten Sleman tahun 2024 sebesar Rp39.185.472.498,00 terealisasi sebesar Rp36.836.974.184,88 (94,00%), dengan program sebagai berikut:

Anggaran dan Realisasi Keuangan Program pada Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Tahun 2024

Program	Anggaran	Realisasi	Persentase
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	6.714.592.768,00	6.086.783.995,32	90,63%
Program Pemberdayaan Sosial	2.033.778.500,00	1.986.056.225,61	97,65%
Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	7.750.150,00	0,00	0,00%
Program Rehabilitasi Sosial	11.653.834.580,00	10.890.115.777,03	93,45%
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	17.035.324.600,00	16.168.901.076,92	94,91%





Program	Anggaran	Realisasi	Persentase
Program Penanganan Bencana	1.242.989.950,00	1.208.058.060,00	97,19%
Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	35.129.950,00	35.053.050,00	99,99%
Jumlah	39.185.472.498,00	36.836.974.184,88	94,00%

Sumber: Dinas Sosial, 2025

c. Permasalahan yang Dihadapi

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan sosial di Kabupaten Sleman tahun 2024, sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya komposisi penduduk lanjut usia dan dampaknya terhadap permasalahan sosial.

Kabupaten Sleman memiliki proporsi penduduk lanjut usia yang terus meningkat, yang berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan sosial di masa depan. Saat ini, Sleman menjadi wilayah dengan Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH) tertinggi di Indonesia, mencerminkan meningkatnya angka harapan hidup masyarakat. Pada tahun 2010, UHH Sleman tercatat sebesar 74,43 tahun dan meningkat menjadi 75,48 tahun pada tahun 2024. Peningkatan ini sejalan dengan tren demografi yang menunjukkan bahwa jumlah penduduk lanjut usia di Sleman meningkat dengan rata-rata 3,19% per tahun selama periode 2010-2020. Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan tren ini akan terus berlanjut dengan peningkatan signifikan hingga tahun 2045, yang berpotensi menimbulkan tantangan baru dalam aspek pelayanan kesehatan, ketenagakerjaan, serta kesejahteraan sosial bagi kelompok lansia.

- 2) Perlambatan penurunan tingkat kemiskinan.

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Sleman mengalami tren penurunan selama dua dekade terakhir, namun laju penurunannya semakin melambat. Pada tahun 2010, tingkat kemiskinan tercatat 10,70%, kemudian turun menjadi 7,74% pada tahun 2022. Jika dibandingkan antarperiode, laju penurunan kemiskinan pada tahun 2010–2015 mencapai rata-rata 0,54% per tahun, sedangkan dalam periode 2016–2022 laju penurunan melambat drastis menjadi hanya 0,07% per tahun. Perlambatan ini mencerminkan tantangan pengentasan kemiskinan semakin kompleks, terutama terkait dengan masalah struktural seperti ketimpangan akses ekonomi, ketahanan daya beli masyarakat, serta ketersediaan lapangan pekerjaan layak dan berkelanjutan.





3) Perbedaan sumber data kemiskinan yang menyulitkan penentuan sasaran program

Upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sleman dihadapkan pada tantangan perbedaan sumber data kemiskinan, yang menyebabkan kesulitan dalam menentukan sasaran program secara tepat. Saat ini, terdapat beberapa sumber data kemiskinan yang digunakan oleh berbagai lembaga, antara lain:

- a) Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) – Kementerian Sosial
 - b) Data Kemiskinan Ekstrem – Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK)
 - c) Data Keluarga Miskin dan Keluarga Rentan Miskin – Pemerintah Kabupaten Sleman
 - d) Data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) – Badan Pusat Statistik
- Ketidaksinkronan antar data ini menyebabkan kesulitan dalam penentuan sasaran program, alokasi bantuan, serta efektivitas kebijakan pengentasan kemiskinan di tingkat lokal.

4) Ketimpangan pendapatan yang masih tinggi

Kabupaten Sleman masih menghadapi permasalahan tingginya ketimpangan pendapatan, yang semakin diperparah oleh migrasi masuk penduduk berpenghasilan menengah ke atas serta laju pertumbuhan pendapatan masyarakat kelas bawah yang jauh lebih lambat dibandingkan dengan kelompok menengah atas. Tingkat ketimpangan pengeluaran masyarakat Sleman, yang diukur dengan rasio gini, tercatat sebesar 0,425 pada tahun 2022, yang berada di atas rata-rata nasional (0,381). Ketimpangan ini mengindikasikan bahwa kesenjangan kesejahteraan antar kelompok sosial masih menjadi tantangan serius, yang memerlukan intervensi kebijakan lebih inklusif guna memastikan distribusi ekonomi yang lebih merata.

5) Belum optimalnya peran tim penanggulangan kemiskinan di kapanewon dan kalurahan

Tim Penanggulangan Kemiskinan (TPK) telah dibentuk di 17 kapanewon dan 86 kalurahan, namun perannya dalam mengakselerasi pengentasan kemiskinan masih belum optimal. Salah satu kendala utama adalah belum





adanya regulasi yang mengatur secara spesifik dukungan anggaran untuk program penanggulangan kemiskinan di tingkat kapanewon dan kalurahan. Dukungan regulasi dan penganggaran yang lebih jelas diperlukan agar TPK dapat berfungsi secara maksimal dalam mendukung program pengentasan kemiskinan di tingkat lokal.

6) Meningkatnya permasalahan sosial dan kelompok rentan

Kabupaten Sleman menghadapi tantangan sosial yang semakin kompleks, termasuk intoleransi, kekerasan terhadap perempuan dan anak, konflik antar kelompok, peningkatan jumlah penderita HIV/AIDS, serta isu sosial yang berkaitan dengan hiburan malam dan prostitusi. Selain itu, ketimpangan digital, keberadaan kelompok LGBT, dan kelompok marjinal lainnya juga menjadi bagian dari permasalahan sosial yang memerlukan perhatian khusus. Selama lima tahun terakhir, terdapat tren peningkatan signifikan dalam jumlah kasus yang berkaitan dengan kelompok rentan tersebut. Permasalahan ini menuntut pendekatan yang lebih komprehensif dan berbasis data dalam penyusunan kebijakan sosial, agar dapat memberikan solusi yang tepat dan berkelanjutan bagi kelompok terdampak.

C. Hasil EPPD dan Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Sebelumnya

1. Hasil EPPD Tahun Sebelumnya

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1109 Tahun 2023 Kabupaten Sleman berhasil mendapatkan hasil EPPD dengan skor kinerja 2,69 dan status kinerja SEDANG.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7-6646 Tahun 2023 Kabupaten Sleman berhasil mendapatkan hasil EPPD dengan skor kinerja 3,1895 dan status kinerja SEDANG.

Hasil penilaian Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tahun 2024 masih menunggu hasil penilaian oleh Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri.





2. Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2024

Berdasarkan Laporan Nomor 3A/LHP/XVII.YOG/03/2024 Tanggal 4 Maret 2024 Kabupaten Sleman berhasil mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2023. Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2024 sampai saat ini masih dalam proses.

D. Ringkasan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Anggaran Daerah

Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman (*Unadited*) Tahun 2024 Realisasi Pendapatan Kabupaten Sleman Tahun 2024 mencapai sebesar Rp3.238.107.257.277,72 dari target sebesar Rp3.232.073.129.832,00 (100,19%) dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2024 mencapai Rp3.287.530.719.211,45 dari target sebesar Rp3.434.915.639.694,00 (95,71%).

Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2024

Kode Rekening	Jenis Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
5.1.1.1	Pendapatan Asli Daerah	1.199.635.489.534,00	1.184.122.706.289,95	98,71
5.1.1.1.a	Pendapatan Pajak Daerah	869.022.775.000,00	851.515.175.943,00	97,99
5.1.1.1.b	Pendapatan Retribusi Daerah	233.738.500.268,00	250.838.782.616,00	107,32
5.1.1.1.c	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	42.893.103.269,00	43.658.915.550,82	101,79
5.1.1.1.d	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	53.981.110.997,00	38.109.832.180,13	70,60
5.1.1.2	Pendapatan Transfer	2.023.918.332.763,00	2.045.593.097.714,77	101,07
5.1.1.2.a	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan	1.511.890.239.284,00	1.523.715.553.910,00	100,78
5.1.1.2.a.1	Dana Bagi Hasil	52.075.602.000,00	67.701.048.000,00	130,01
5.1.1.2.a.2	Dana Alokasi Umum	1.047.026.829.000,00	1.047.026.829.000,00	100,00
5.1.1.2.a.3	Dana Alokasi Khusus - Fisik	51.762.480.000,00	48.325.090.003,00	93,36
5.1.1.2.a.4	Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	361.025.328.284,00	360.662.586.907,00	99,90
5.1.1.2.b	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	175.950.404.000,00	175.950.404.000,00	100,00
5.1.1.2.b.1	Dana Insentif Daerah	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2.b.2	Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2.b.3	Dana Keistimewaan	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2.b.4	Dana Desa	125.833.460.000,00	125.833.460.000,00	100,00
5.1.1.2.c	Pendapatan Transfer Antar Daerah	336.077.689.479,00	345.927.139.804,77	102,93
5.1.1.2.c.1	Pendapatan Bagi Hasil	273.841.995.779,00	284.554.946.950,00	103,91
5.1.1.2.c.2	Bantuan Keuangan	62.235.693.700,00	61.372.192.854,77	98,61
5.1.1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	8.519.307.535,00	8.391.453.273,00	98,50
5.1.1.3.1	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	Pendapatan Dana Darurat	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	Pendapatan Lainnya	8.519.307.535,00	8.391.453.273,00	98,50
	Jumlah Pendapatan	3.232.073.129.832,00	3.238.107.257.277,72	100,19

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah, 2025





Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2024

Kode Rekening	Jenis Belanja	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
5.1.2.1	Belanja Operasi	2.593.270.627.441,00	2.487.580.675.794,01	95,92
5.1.2.1.a	Belanja Pegawai	1.232.900.312.118,00	1.201.774.207.847,15	97,48
5.1.2.1.n	Belanja Barang dan Jasa	1.073.236.433.800,00	1.004.359.213.776,87	93,58
5.1.2.1.c	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00
5.1.2.1.d	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
5.1.2.1.e	Belanja Hibah	246.774.001.523,00	243.365.677.021,99	98,62
5.1.2.1.f	Belanja Bantuan Sosial	40.359.880.000,00	38.081.577.148,00	94,36
5.1.2.2.	Belanja Modal	328.562.346.282,00	295.776.985.478,44	90,02
5.1.2.2.a	Belanja Modal Tanah	35.000.000,00	34.911.950,00	99,75
5.1.2.2.b	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	113.065.615.989,00	104.551.150.200,11	92,47
5.1.2.2.c	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	93.019.942.285,00	71.681.993.561,11	77,06
5.1.2.2.d	Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	111.525.390.286,00	109.055.080.096,22	97,78
5.1.2.2.e	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	8.226.656.509,00	8.007.727.910,00	97,34
5.1.2.2.f	Belanja Modal Aset Lainnya	2.689.741.213,00	2.446.121.761,00	90,94
5.1.2.3	Belanja Tak Terduga	19.915.622.161,00	14.169.125.700,00	71,15
5.1.2.3.a	Belanja Tak Terduga	19.915.622.161,00	14.169.125.700,00	71,15
5.1.2.4	Belanja Transfer	493.167.043.810,00	490.003.932.239,00	99,36
5.1.2.4.a	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa	95.181.979.517,00	92.499.028.027,00	97,18
5.1.2.4.b	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota	259.071.000,00	259.071.000,00	100,00
5.1.2.4.c	Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi	144.625.610,00	144.625.610,00	100,00
5.1.2.4.d	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	397.581.367.683,00	397.101.207.602,00	99,88
	Jumlah Belanja	3.434.915.639.694,00	3.287.530.719.211,45	95,71

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah, 2025

E. Inovasi Daerah

Berdasarkan Database Inovasi Daerah Tahun 2024, Kabupaten Sleman memiliki inovasi daerah sebagai berikut:

Inovasi Daerah Tahun 2024

No.	Nama Inovasi	Instansi Pelaksana	Awal Penerapan
1.	Cendol Manis (Cerita Dongeng Literasi Masuk dan Berinteraksi di Sekolah)	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2024
2.	E-Klik Berisi Bullying, Percintaan dan Nilai Akademik untuk Mengetahui Perkembangan diri Siswa	SMP Negeri 1 Sleman	2024
3.	EKALIT (Ekadanta Berliterasi), Kegiatan dan program terkait kemampuan literasi informasi	SMP Negeri 2 Berbah	2024
4.	Gelis Candi (Gerakan Literasi Sd Negeri Candisari)	SD Negeri Candisari	2024
5.	Genius (Game Notasi Ilmiah untuk Sains)	SMP Negeri 1 Cangkringan	2024
6.	Sistem Geoportal	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	2024
7.	Implementasi Modul Python dengan Metode <i>Cascade Classifier Sibi</i> menggunakan <i>Mediapipe Holistic</i> secara <i>Real Time</i> Bagi Penderita Tuna Rungu	SMP Negeri 3 Kalasan	2024
8.	Kalurahan Layak Lansia dan Bebas Stunting	Kalurahan Summersari	2024
9.	<i>Panewu Goes to School</i>	Kapanewon Gamping	2024
10.	PELITA (Peduli Lingkungan Kita)	Kapanewon Berbah	2024
11.	Pemanfaatan Limbah Minyak Jelantah Sebagai Bahan Pembuat Sabun Cuci Sepatu Ramah Lingkungan	SMP Muhammadiyah 1 Mlati	2024





No.	Nama Inovasi	Instansi Pelaksana	Awal Penerapan
12.	Pengembangan Kartu Sampah Pintar berbasis Internet Of Things menggunakan QR Code dan Website guna tingkatkan Efektifitas Pengelolaan Sampah di Ponpes Assalafiyah	MTS Assalafiyah Mlangi, Nogotirto, Gamping	2024
13.	Pengembangan Kompleks Lapangan Kalurahan sebagai Ruang Terbuka Hijau	Kalurahan Banyuraden	2024
14.	Relax (<i>Respite and Easing Life's Anxieties</i>) Aplikasi penanganan korban Anxieties pada siswa SMP	SMP Negeri 1 Kalasan	2024
15.	Satu Data UMKM Kabupaten Sleman	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	2024
16.	SATU HATI (Sinergi Aksi Untuk Sejahterakan Mlati)	Kapanewon Mlati	2024
17.	Satu Sama Bunda (Satu UMKM Satu Mahasiswa Bibit Unggul Daerah)	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	2024
18.	SI MBOK MUN (Optimalisasi Budidaya Lombok dan Timun)	Kalurahan Pondokrejo	2024
19.	SIDAMPAK (Sistem Informasi Database Administrasi Data Kependudukan)	Kalurahan Wukirsari	2024
20.	SIDARLING (Sistem Informasi Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Sleman)	Dinas Lingkungan Hidup	2024
21.	SIMANTAB (Sistem Informasi Sleman Tangguh Bencana)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2024
22.	Aplikasi Simpelomas (Sistem Pelayanan Metrologi Legal Sleman).	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2024
23.	SIMRUWA (Sistem Informasi Manajemen Rusunawa)	UPTD Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa)	2024
24.	SIMTANGKAS (Sistem Informasi Pemanfaatan Tanah Kalurahan dan Tanah Kasultanan)	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	2024
25.	Sinduharjo Migunani	Kalurahan Sinduharjo	2024
26.	SIPP BAPAK (Sistem Informasi Perencanaan dan Penganggaran Bantuan Keuangan Khusus kepada Kalurahan)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2024
27.	Smart Wheelchair kursi roda elektrik pengatur kecepatan dan sandaran punggung	SMP Negeri 1 Turi	2024
28.	Suko Uwor Uwor (Sumur Kompos untuk Uwuh Organik)	Kalurahan Tridadi	2024
29.	Yogibot (<i>Interactive Cultural Experience of Yogyakarta Through AI-Powered Chatbot</i>)	SMP Negeri 1 Ngemplak	2024

Sleman, 25 Maret 2025

Bupati Sleman,



HARDA KISWAYA

